KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pengondisian Narsai Pilpres Satu Putaran kian Terasa
Tanggal : Rabu, 03 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pengondisian Narasi Pilpres Satu Putaran kian Terasa

ADA upaya pengondisian lembaga survei untuk menarasikan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran. Pemaksaan narasi tersebut dirasakan kubu pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Hal itu disampaikan Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima saat menggelar konferansi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, seperti dilaporkan *Metro TV*, kemarin.

Ia mendengar informasi pengondisian narasi satu putaran itu dari koleganya yang berada di kubu Amin. Aria Bima sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR mengaku sering berdiskusi mengenai pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung Amin di NasDem, PKB, dan PKS.

"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01 (Amin) memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," ujar Aria Bima.

Aria Bima memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam narasi satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lanjut Aria Bima, harusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden. "Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.

Bahkan, ia mendapatkan informasi ketika lembaga survei terjun mewawancarai responden yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, atau RW, mereka harus meminta izin ke kepala kepolisian sektor (kapolsek). Kemudian dari kapolsek ke Bhabinkatibmas. Semua proses itu memakan waktu 10 hari sampai keluar izin.

"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada. Ada kecenderungan 10 hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," jelas Aria Bima.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membantah tudingan lembaga survei harus mendapatkan izin dari kepala kepolisian setempat terlebih dahulu sebelum menyebar kuesioner.

"Kita menjelaskan kaitannya dengan lembaga survei yang ingin menyebarkan kuesioner tentunya bukan merupakan ranah kepolisian sehingga tidak harus izin kepolisian," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, kemarin.

Ramadhan menjelaskan tupoksi Polri ialah mengamankan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di samping itu, Ramadhan kembali menegaskan soal netralitas Polri dalam pesta demokrasi 2024 tersebut. Seluruh anggota Polri dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2024.

"Kembali ke netralitas Polri, Polri itu tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon), kepada salah satu calon legislatif (caleg). Ya, intinya tidak boleh terlibat politik praktis," tegasnya. (Yon/P-2)